

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abdul Haris Semendawai, 2011, *Memahami Whistleblower Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Jakarta: LPSK.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- E Mulyasa, 2004, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional, Dalam Konteks Menyuksesan MBS dan KBK*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Elwi Danil, 2011. *Korupsi: Konsep Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Firman Wijaya, 2012, *Whistle Blower dan Justice Collaborator, dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Penaku.
- Fr Floriano. C. Roa, 2007, *Business Ethics and Social Responsibility in Philippine Perspective, First Edition*, Manila: Rex Book Store.
- Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), 2014, *Fraud and Corruption Prevention Policy and Whistleblower Mechanism, Global Alliance For Improved Nutrition (GAIN)*
- Handayani S, 2006. *Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi*, Cetakan Pertama, Surakarta: Kompip Solo
- Ilias Chatzis, *Praktik Terbaik Perlindungan Saksi Dalam Proses Pidana yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir*, Jakarta: LPSK.
- Ismail Mohamad, 2003, *Aktualisasi Pelayanan Prima Dalam Kapasitas PNS sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat*. Bandung: Mandar Maju,
- Jimly Asshiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Juliantara Dadang, 2002, *Pembaruan Desa: Bertumpu pada Apa yang Terbawa*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Komariah E, Sapardjaja, 2010, *Wawancara Khusus: Pakar Hukum Pidana Universitas Padjajaran Bandung*, Newsletter: Komisi Hukum Nasional.
- Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008, *Pedoman Sistem Pelaporan*

Pelanggaran – SPP (Whistleblowing System – WBS), Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.

Ladjamudin, 2005, *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu,

Lexy Moleong J, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto dan Sudaryanto, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Mardjono Reksodiputro, 2011, *Pembocor Rahasia dan Penyadapan (Wiretapping Electronic Interception) dalam Menanggulangi Kejahatan di Indonesia*, Jakarta: Wacana Govermity board. Earley, Pete dan Gerald Shur, ELSAM Cetakan Pertama tahun 2006 hlm. 9.

Maria Sumardjono, 1996, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Marpaung, Leden, 1997, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Preverensinya*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mas' oed Mochtar, 1997, *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 3.

Mas' oed Mochtar, 1997, *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Quentin Dempster, 2006, *Whistleblower (Para Pengungkap Fakta)*, Jakarta: Elsam

R Wiyono, 2012, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Robert K, 2019, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.

Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: UII Press, Cetakan Pertama.

Sastropoetro, R.A. Santoso, 1998, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Alumni.

Serikat Noman Putra Jaya, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Sjahrir, 2004, "*Korupsi di Indonesia: Kanker Terminal*" dalam *Surga Para Koruptor*", Jakarta: Kompas.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta.

Sri H dan Hartini, J, Sitiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, 2008, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta

Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Press.

Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Tim Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, 2011 "*Mewujudkan Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*". Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

United Nations, United Nations E-Government Survey, 2014, *E-Governance for the Future We Want*, New York Bern Assoc,

W. Michael Hoffman and Robert E. McNulty, 2017, *A Business Ethics Theory of Whistleblowing: Responding To The \$1Trillion Question*, Center for Business Ethics Bentley University, Waltham U.S.A.

Wijaya Firman, 2012, *Whistle Blower dan Justice Collaborator, dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Penaku.

Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana*, Malang: Setara Press

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pedoman *Whistleblower System* di Lingkungan Pemerintah Sumatera Barat.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

C. Skripsi

Arfiani Haryanti, 2016, *Penerapan Whistle Blowing System (Wbs-Bkn) Dalam Mendukung Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Dan Prosedur Manajemen Kepegawaian Asn*, Direktorat Pengawasan Dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan Dan Pasca Diklat Badan Kepegawaian Negara.

Dina D.O.R dan Wiwit Hariyanto, 2019, “*Pelaksanaan Internal Audit Terhadap Niat Whistleblowing Dalam Rangka Mencapai Good Corporate Governance Melalui Perceived Environmental Uncertainty (Pada Perusahaan Farmasi Di Sidoarjo)*”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah.

H Sirait. S. S. 2018. *Analisis Terhadap Inpres No. 7 Tahun 2015 jo Inpres No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi Kaitannya dengan Peranan Kejaksaan Sebagai Penyidik*. Tesis Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Imam Thurmudhi, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Susno Duadji)*, Tesis, Program Studi Pasca Sarjana Kekhususan Kejahatan Ekonomi dan Anti Korupsi.

Turmudhi, I, 2011, *Perlindungan hukum terhadap whistleblower kasus korupsi berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban: studi kasus susno duadji*. Nur Fitri R, 2020, “*Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Perceived Behavioral Control, Komitmen Organisasi, dan Tingkat Keseriusan Pelanggaran Terhadap Intensi Melakukan Whistleblowing*”, Skripsi Sarjana Universitas Negeri Semarang, Semarang.

D. Jurnal

A Brief. P. dan S. J. Motowidlo. 1986. *Prosocial Organizational Behaviours*. Academy of Management Review: 11(4).

Antari N P. B. W, 2020, *Penguatan Whistleblowing System di Indonesia (Studi Kasus Whistleblowing System di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI))*. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 158-167.

Asri Sjafirah dan Ditha Prasanti 2016, *Penggunaan Media Komunikasi Dalam Eksistensi Budaya Lokal Bagi Komunitas Tanah Aksara Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Penggunaan Media Komunikasi Dalam Eksistensi Budaya Lokal Bagi Komunitas Tanah Aksara Di Bandung*, Jurnal Vol.6. Nol. 2, 2016, hlm.3.

Destriana Kreshastuti, Kurnia, and Andri Prastiwi. 2014. "Analisis Faktor-Faktor

yang Mempengaruhi Intensi Auditor untuk Melakukan Tindakan Whistleblowing (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Semarang). *Dipenogoro Journal of Accounting* 3(2), Yogyakarta, hlm 11.

Eddy O. S, Hiariej, 2010, Legal Opini, *Permohonan Pengujian Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksidan Korban*, Newslette: Komisi Hukum Nasional, Vol. 10 No. 6 tahun 2010, Hlm. 23

I Gede Made Sadguna, 2005, “Peranan PPAATK dalam Pemberantasan Korupsi Menuju Good Corporaate Governance Sektor Keuangan”, *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 24 No. 3 Tahun, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, hlm. 6.

Icek Ajzen, 1991, *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes* (50:2), Academic Press. hlm. 181-182.

Kelengkapan bukti juga merupakan faktor penting dalam mendorong pelaporan TPK oleh *whistleblower*, termasuk tingkatan bukti. Menurut Miceli dan Near.Sumber: Near, J.P., dan M.P. Miceli. 1985. *Organizational Dessionence: The Case of Whistleblowing. Jurnal of Business Ethics*. Vol.4, No. 1, pp. 1-16.

M Kumar, dan Santoro, D, 2017, *A justification of whistleblowing. Philosophy dan Social Criticism*, 43 (7).

Nicholas Charron, Victor Lapuente, and Ba Rothstein, 2013, *Quality of Government and Corruption from a European PpectiveA Comparative Study of Good Government in EU Regions* , United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited, hlm. 14.

Nur Fitri R, 2020,“*Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Perceived Behavioral Control, Komitmen Organisasi, Dan Tingkat Keseriusan Pelanggaran Terhadap Intensi Melakukan Whistleblowing*”,Skripsi Sarjana Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 27.

Philipus M. Hadjon, 2002, Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, *Jurnal Meitokrasi*. hlm 11-15

R Gusherinsya, & Samukri, S, 2020, Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), hlm 58-68.

R Hanif. A dan Odiatma, F. 2017. *Pengaruh Lingkungan Etika Terhadap Niat Melakukan Whistleblowing Dengan Locus of Control Sebagai Variabel Moderasi*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Bisnis*, 10 (2), <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/article/view/1548>, hlm. 2.

Rohman dan Yayang, 2019,“*Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik*”, Program Studi Administrasi

Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi, Vol.9, No.2, 2019, hlm.154.

Rossinta Indahsari, 2018, "*Niat Individu Melakukan Whistleblowing: Theory of Planned Behavior dan Prosocial Behavior Theory*", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Vol 6, No. 2, 2018, hlm 7.

Rusli Muhammad, 2015, *Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2 Vol. 22, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm.214.

Siringoringo, Whereson, *Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Whistleblowing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Resiko Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bekasi)*, Jurnal Akuntansi, Vol 19, No 2, 2015.

Srividya, S and Shelly, C. Stalin. 2012. *Whistleblowing Protection – a watch dog for the organization. International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research*. Vol. 1, Page. 23.

T Kurniawan. (2011). Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 16 (2).

E. Artikel

Arga Sumantri , *Perlindungan Terhadap Pelapor Kasus Korupsi Dinilai Masih Lemah*, <http://news.metrotvnews.com/hukum/5b2jZ0rb-perlindunganterhadap-pelapor-kasus-korupsi-dinilai-masih-lemah>, di akses pada tanggal 8 Agustus 2021 pukul 02.30 WIB.

Corruption Watch, *The Whistleblowers's Handbook*, Corruption Watch, <http://www.corruptionwatch.org.za/> , hlm. 2. Dikunjungi pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 15.59 WIB.

Darmayanti dan Widyaiswara BDA KP, *Makna Sebuah Integritas*, <https://kkp.go.id/brsdm/bdasukamandi/artikel/19129-makna-sebuah-integritas>, dikunjungi tanggal 21 Oktober 2021 pukul 20.59.

David Oliver Purba "*ASN Penyeleweng Dana Infak Masjid Raya Sumbar Divonis 7 Tahun Penjara*", <https://regional.kompas.com/read/2021/02/07/11030081/asn-penyeleweng-dana-infak-masjid-raya-sumbar-divonis-7-tahun-penjara?page=all>, dikunjungi pada tanggal 16 September 2021 pukul 15.03 WIB

Education at a Glance, 2011, <https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/48631582.pdf>, dikunjungi pada Tanggal 20 Desember 2021 Pukul 07.35 WIB

G Hofstede, 2011, *Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context*. *Online Readings in Psychology and Culture*, 2(1) at <http://dx.doi.org/10.9707/2307-0919.1014>.

Hasan Mustafa, “*Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial*”, <https://media.neliti.com/media/publications/72251-ID-perilaku-manusia-dalam-perspektif-psikol.pdf>, dikunjungi, tanggal 8 September 2021 Pukul 17.46

<http://satudunia.oneworld.net/?q=node/2235>, dikunjungi pada tanggal 20 September 2021 Pukul 20.00 WIB

Institute for Criminal Justice Reform, *Dua Pelapor (Whistleblower) Korupsi yang Dilindungi LPSK Justru Terancam Masuk Penjara*, <http://icjr.or.id/duapelapor-whistleblower-korupsi-yang-dilindungi-lpsk-justru-terancam-masuk-penjara/>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2021 pukul 03.40 WIB.

Institute for Criminal Justice Reform, *Review ICJ, Ratas Ancaman dan Perlindungan Pelapor atau Whistleblower, 2016*, <https://icjr.or.id/review-icjr-atas-ancaman-dan-perlindungan-pelapor-atau-whistle-blower-di-2016/>, di akses pada tanggal 8 Agustus 2021 pukul 02.30 WIB

Investopedia, *Apa Itu Business Ethics?* <https://blog.pluang.com/cerdascuan/business-ethics/>, Di kunjungi pada Tanggal 30 November 2021, pukul 14.00 WIB.

Koalisi Perlindungan Saksi, *Pengertian Saksi dan Perlindungan bagi Para Pelapor haruslah diperluas*. Sumber: www.antikorupsi.org,

Koalisi Perlindungan Saksi, *Pengertian Saksi dan Perlindungan bagi Para Pelapor haruslah diperluas* www.antikorupsi.org, diakses terakhir kali tanggal 8 Agustus 2021

Ramdziana. Yustitianto, *Xkeyscore: Program NSA yang Berjalan di Ribuan Server Red Hat Linux*, <https://kabarlinux.web.id/>, dikunjungi pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 14.45 WIB.

Ramli Atmasasmita, 2012, *Justice Collaborator, Mungkinkah?* SINDO, 24 Mei 2012

Reformasi Sistem Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel <https://acch.kpk.go.id/en/artikel/paper/505-reformasi-sistem->

penegakan-hukum-dan-pelayanan-publik-yang-transparan-dan-akuntabel, dikunjungi pada tanggal 28 Desember 2021, pukul 15.00 WIB.

Sasmito Madrim. *Sama Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dan Gambia*. Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/sama-skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-dan-gambia/5756699.html>. Pada tanggal 6 September 2021, Pukul 11.05 WIB.

Transparency International Indonesia, 2017, *Pedoman Whistle Blowing System dan Justice Collaborator*, <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2021/04/Pedoman-Whistle-Blowing-System-dan-Justice-Collaborator.pdf>, hlm 1-2, di kunjungi pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 17.00 WIB.

Whistleblowers International, *The History of Whistleblowing In America: Whistleblower, America*, <https://www.whistleblowersinternational.com>, di kunjungi pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 15.00 WIB.

